



ANALISIS PERAN BANK INDONESIA SEBAGAI PENGAWAS INOVASI TEKNOLOGI SEKTOR KEUANGAN SISTEM PEMBAYARAN DI INDONESIA

Oleh: Defa An Nuur Kusumajakti¹ dan Royhan Akbar²

INTISARI

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap ITS-K sistem pembayaran. Menganalisis sejauh mana Bank Indonesia mengatur dan mengawasi penyelenggaraan ITS-K sistem pembayaran terutama terkait masalah yang menyangkut ITS-K sistem pembayaran. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui urgensi pembaharuan pengaturan oleh Bank Indonesia terhadap ITS-K sistem pembayaran pasca diterbitkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku, serta literatur yang berhubungan dengan peran Bank Indonesia sebagai pengawas ITS-K sistem pembayaran. Selanjutnya hasil penelitian akan dianalisis menggunakan metode kualitatif dan dituliskan dalam bentuk deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia sudah cukup kompleks dan detail terkait ITS-K sistem pembayaran. Pembaharuan pengaturan oleh Bank Indonesia pasca diterbitkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan belum menjadi urgensi utama. Penulis menyoroti dua aspek yang dapat dimaksimalkan Bank Indonesia sebagai pengawas yaitu edukasi keuangan dan optimalisasi peran SRO.

Kata kunci : Bank Indonesia, Pengawasan, Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Sistem Pembayaran

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Departemen Hukum Bisnis, 2020, Universitas Gadjah Mada

² Dosen Fakultas Hukum Departemen Hukum Bisnis, Universitas Gadjah Mada



ANALYSIS THE ROLE OF BANK INDONESIA AS A SUPERVISOR OF FINANCIAL TECHNOLOGY IN THE PAYMENT SYSTEM IN INDONESIA

By: Defa An Nuur Kusumajakti¹ and Royhan Akbar²

ABSTRACT

This research aims to examine Bank Indonesia's regulations and supervises financial technology (ITSK) in the payment system. The study analyzes the extent to which Bank Indonesia regulates and oversees the implementation of ITSK in the payment system, particularly regarding issues related to ITSK. Furthermore, the research seeks to assess the urgency of regulatory updates by Bank Indonesia on ITSK in the payment system following the issuance of Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector.

This study uses a normative juridical method. Normative legal research is conducted by analyzing laws and regulations, books, and literature related to the role of Bank Indonesia as the supervisor of ITSK in the payment system. The results of the research will then be analyzed using qualitative methods and presented descriptively.

The findings indicate that the regulation and supervision carried out by Bank Indonesia regarding ITSK in the payment system are already quite complex and detailed. The regulatory updates by Bank Indonesia following the issuance of Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector have not yet become a primary urgency. The authors highlight two aspects that Bank Indonesia can optimize as a supervisor: financial education and the optimization of the role of Self-Regulatory Organizations (SRO).

Keywords: *Bank Indonesia, Supervision, Financial Technology Innovation, Payment System*

¹ Undergraduate Student of Business Department Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.

² Lecturer of Faculty of Law Universitas Gadjah Mada.